



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya, Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan rencana kerja ini sebagai acuan atas perencanaan program dan kegiatan pada Tahun 2021 sebagai tindak lanjut program yang tersusun dalam Rencana Strategis 2018 - 2023 dan RKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan ini masih belum sempurna sehingga kritik, saran dan masukan yang konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan guna kesempurnaan dalam penyusunan Rencana Kerja ditahun yang akan datang.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu.

Makassar, Juli 2020


KEPALA SATUAN,

Drs. MUJIONO

Pangwat Pembina Utama Muda

NIP. 19640404 198303 1 007

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	32
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	33
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	33
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENGENDALIAN PERANGKAT DAERAH	36
BAB V PENUTUP	44
LAMPIRAN :	
Hasil Pemetaan Program/Kegiatan terhadap Permendagri Nomor 19 Tahun 2019.	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Hal tersebut disusun dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara berkaitan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Pasal 7 menyatakan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (PD) wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis PD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KU) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, yang mana penyusunannya memperhatikan kewenangan lembaga dan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang agar tercipta keterpaduan Rancangan Rencana Kerja PD. Sesuai amanat tersebut di atas, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, yaitu : "Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter".

Untuk mencapai visi tersebut, implementasinya dijabarkan dalam 5 misi pembangunan yaitu :

1. Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif;
2. Peningkatan Infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel;
3. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
4. Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif;
5. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.

Pelayanan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan dalam rangka mencapai 2 misi Gubernur, yaitu Misi Pertama 'Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif' dan Misi Keempat 'Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif'.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Untuk itu Rencana Kerja Tahun 2021 menjadi bagian yang tak terpisahkan sekaligus merupakan proses penetapan kegiatan beserta indikator kinerjanya yang ditetapkan sesuai dengan kebijakan, sasaran, program kegiatan yang mengacu kepada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 – 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 315);
 - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 550);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1447)
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 548);
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja adalah untuk memenuhi regulasi kebijakan yang berkembang, perencanaan yang menjadi rujukan, isu strategis dan sebagai instrument perencanaan dan penganggaran periodik berfungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai acuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengaplikasikan perencanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran,
- b. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan tupoksi OPD;
- c. Menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi OPD.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

- a. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2021 dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Perwujudan efisiensi dan efektifitas dalam alokasi sumber daya berdasarkan pertimbangan pagu indikatif dan skala prioritas;
- c. Terwujudnya integritas, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan progam dan kegiatan;
- d. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam menilai implementasi program serta kegiatan Tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana kerja (RENJA) Tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berisi tentang Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan pasal 255, 256, dan 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Untuk mendukung arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan antara lain peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan.

1.2. Landasan Hukum

Memuat dasar regulasi sebagai acuan kebijakan dalam perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berisi Evaluasi Rencana Strategis, Evaluasi Kinerja Renja Perangkat Daerah dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun lalu.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAHTAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Analisis tentang evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan sebelumnya diperlukan untuk mendapatkan informasi dan masukan tentang keberhasilan pelaksanaan pembangunan berikut faktor keberhasilan dan kendala yang dihadapi. Informasi ini sangat berguna dalam merumuskan kebijakan pembangunan berikut program dan kegiatan yang akan direncanakan untuk tahun berikutnya dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun berdasarkan laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 secara keseluruhan pelaksanaan Renja mencapai 98,51 %. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja program dan kegiatan berjalan optimal. Sedangkan pelaksanaan Renja pada Tahun 2020 sampai dengan semester I sebesar 42% dan kemungkinan masih dapat meningkat lagi karena waktu yang tersedia cukup lama dan penyerapan anggaran melalui pengadaan barang/jasa relatif masih besar, sehingga masih dapat tercapai pelaksanaan renja sebesar 98,51%

Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2020 dan perkiraan target tahun 2021. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

b. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program/kegiatan Tahun 2019.

Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2019 sebesar Rp. 33.306.832.844,00 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Enam Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*), terdiri atas Belanja Langsung (BL) Rp. 17.683.309.208,00 dan Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp.15.623.523.636,00. Realisasi sebesar Rp. 32.810.839.619,00 (*Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah*) atau sekitar 98,51% terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 17.437.328.068,00 atau sekitar 98,61% serta Belanja Langsung sebesar Rp. 15.373.511.551,00 atau sekitar 98,40% yang dijabarkan melalui 27 kegiatan yaitu sebagai berikut :

HASIL EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019								
NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp.)	REALISASI KINERJA		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
		TOLOK UKUR	TARGET		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			33.306.832.844,00		32.810.839.619,00	98,51	98,51
	BELANJA TIDAK LANGSUNG			17.683.309.208,00		17.437.328.068,00	98,61	98,61
I.	PROGRAM LAYANAN DAN PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH (PRIORITAS)	% Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan hukum Perda dan Perkada (SPM)	100%	432.931.000,00		377.266.670,00	87,14	87,14
1	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan	Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah	12 Kasus	98.061.000,00	12 Kasus	78.662.350,00	80,22	80,22
2	Pemetaan Kasus Non Yustisi	Jumlah Data dan Peta Lokasi Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah	5 Lokasi	76.820.000,00	5 Lokasi	60.406.400,00	78,63	78,63
3	Satgas Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan	Jumlah Aparat Satgas Penegakan Perda dan Pergub Sulawesi Selatan	78 Orang	258.050.000,00	78 Orang	238.197.920,00	92,31	92,31
II.	PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI POLISI PAMONG PRAJA	Cakupan Petugas SatPol PP yang terlatih	100%	200.047.500,00		190.755.000,00	95,35	95,35
1	Pelatihan Dasar/Kesamaptaaan SatPol PP	Jumlah Peserta Pelatihan Dasar/Kesamaptaaan Personil Pol PP	65 Orang	170.250.000,00	65 Orang	170.055.000,00	99,89	99,89
2	Pembinaan Mental, Spiritual dan Etika Pegawai SatPol PP	Jumlah Peserta Pembinaan Mental, Spiritual dan Etika Pegawai SatPol PP	150 Orang	6.000.000,00	150 Orang	4.650.000,00	77,50	77,50
3	Pembinaan, Penyuluhan dan edukasi potensi masyarakat melalui deteksi dini penanganan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Peserta Bimtek Aparat SatPol PP dalam penanganan deteksi dini	50 Orang	13.150.000,00	50 Orang	11.900.000,00	90,49	90,49
4	Forum Kewaspadaan Dini	Jumlah Peserta Forum Kewaspadaan dini	50 Orang	10.647.500,00	50 Orang	4.150.000,00	38,98	38,98

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp.)	REALISASI KINERJA		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
		TOLOK UKUR	TARGET		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
III.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran, Keamanan, Ketertiban dan Keamanan	100%	339.540.000,00		263.600.000,00	77,63	77,63
1	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi SatPol PP dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan draf ranperda trantibum Prov. SulSel	5 Kali	129.600.000,00	5 Kali	54.000.000,00	41,67	41,67
2	Penyelenggaraan Patroli Wilayah	Jumlah Patroli Wilayah yang dilaksanakan	76 Kali	16.940.000,00	76 Kali	16.870.000,00	99,59	99,59
3	Penyelenggaraan Apel Besar SatPol PP	Jumlah Penyelenggaraan Apel Besar secara terpusat di SulSel	2 Kali	193.000.000,00	2 Kali	192.730.000,00	99,86	99,86
IV.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	100%	36.125.500,00		27.525.500,00	76,19	76,19
1	Penyuluhan dan Sosialisasi Linmas	Jumlah Peserta Sosialisasi Linmas	54 Orang	10.950.000,00	54 Orang	10.850.000,00	99,09	99,09
2	Pembinaan dan Pemberdayaan Sat. Linmas	Jumlah Peserta Pembinaan Sat.Linmas	50 Orang	9.100.000,00	50 Orang	8.200.000,00	90,11	90,11
3	Penguatan Perlindungan Masyarakat Dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Pelaksanaan penguatan linmas dalam penanganan penyandang PMKS	2 Kali	16.075.500,00	2 Kali	8.475.500,00	52,72	52,72
V.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA KEBAKARAN	Cakupan Pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota dan tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMMK)	100%	10.675.000,00		2.575.000,00	24,12	24,12
1	Bimtek Mentality dan Kesamaptan Bagi Anggota Pemadam Kebakaran	Jumlah Peserta Bimtek Mentality dan Kesamaptan Bagi Anggota Pemadam Kebakaran	40 Orang	10.675.000,00	40 Orang	2.575.000,00	24,12	24,12
VI.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100%	12.900.954.636,00		12.818.903.787,00	99,36	99,36
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, internet, dokumentasi/publikasi, koran/majalah, air dan listrik	12 Bulan	32.124.000,00	12 Bulan	25.461.605,00	79,26	79,26

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp.)	REALISASI KINERJA		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
		TOLOK UKUR	TARGET		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
2	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional roda 4 (empat) dan 2 (dua) yang terbayarkan	38 Unit	10.000.000,00	30 Unit	6.702.806,00	67,03	67,03
3	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	Jumlah Jasa Tenaga Keamanan, Ketenteraman dan Keterlibatan umum, jasa kebersihan serta jasa sopir yang terbayarkan	12 Bulan	9.745.534.000,00	12 Bulan	9.691.190.500,00	99,44	99,44
4	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Keamanan Kantor	12 Bulan	345.000.000,00	12 Bulan	345.000.000,00	100,00	100,00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	100 Jenis	144.005.000,00	100 Jenis	142.352.200,00	98,85	98,85
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	45 Jenis	1.669.049.636,00	45 Jenis	1.666.064.500,00	99,82	99,82
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	150 Kali	955.242.000,00	148 Kali	942.132.176,00	98,63	98,63
VI.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100%	1.629.650.000,00		1.619.835.594,00	99,40	99,40
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Asrama	Jumlah unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	10 Unit	420.000.000,00	10 Unit	417.159.500,00	99,32	99,32
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	85 Unit	136.738.000,00	85 Unit	135.605.094,00	99,17	99,17
3	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	12 Unit	1.068.544.000,00	12 Unit	1.062.721.000,00	99,46	99,46
4	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan Dan Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara	120 Unit	4.368.000,00	120 Unit	4.350.000,00	99,59	99,59

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp.)	REALISASI KINERJA		TINGKAT CAPAIAN KINERJA	
		TOLOK UKUR	TARGET		K	Rp.	K (%)	Rp. (%)
VIII.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penggaran dan Pelaporan serta Evaluasi kinerja tepat waktu	100%	45.000.000,00		45.000.000,00	100,00	100,00
1	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Laporan data dan informasi yang dikumpulkan	24 Laporan	45.000.000,00	24 Laporan	45.000.000,00	100,00	100,00
IX.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Cakupan Aparatur Yang Mendapatkan Pelatihan Kompetensi Dibidangnya % Kehadiran Pegawai	100%	28.600.000,00		28.050.000,00	100,00	98,08
1	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	250 Pasang	28.600.000,00	250 Pasang	28.050.000,00	100,00	98,08

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (Tahun berjalan)
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1.01		Urusan Wajib Pelayanan Daerah												
1.01	05	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan												
1.01	05	01.00	Satuan Polisi Pamong Praja											
1.01	05	01.00	01	PROGRAM LAYANAN DAN PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH (PRIORITAS)	% Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada (SPM)	100	20,00	100,00	100,00	100,00	220,00	220,00		
1.01	05	01.00	01	001	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan	Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah	16	15,00	12,00	12,00	100,00	15,00	42,00	262,50
1.01	05	01.00	01	002	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Praktek Ilegal	Jumlah Operasi Penerbitan terhadap Praktek-praktek kerja ilegal	20	30,00	0,00	0,00	0,00	20,00	50,00	250,00
1.01	05	01.00	01	003	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Jumlah peserta Bimtek Pemberkasan Hasil Penyelidikan	40	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	87,50
1.01	05	01.00	01	004	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Area Kawasan Tanpa Rokok	15	20,00	0,00	0,00	0,00	10,00	30,00	200,00
1.01	05	01.00	01	005	Pemetaan Kasus Non Yustisi	Jumlah data dan Peta lokasi kasus pelanggaran Perda	7	1,00	5,00	5,00	100,00	6,00	12,00	171,43
1.01	05	01.00	01	006	Penerapan Kebijakan pada Pedoman Penyelidikan dan Penyidikan	Jumlah pelanggaran Perda dan Pergub Provinsi Sulawesi Selatan yang tertangani	9	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	77,78

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01	05	01.00	01	007	Penyelidikan dan Penyidikan kasus Pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah kasus pelanggaran Perda yang terselesaikan	3	10,00	0,00	0,00	0,00	3,00	13,00	433,33
1.01	05	01.00	01	008	Penyelenggaraan Kerjasama Bantuan Hukum	Jumlah peserta rapat hubungan kerjasama bantuan hukum dalam penegakan perda	120	4,00	0,00	0,00	0,00	110,00	114,00	95,00
1.01	05	01.00	01	009	Satgas Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan	Jumlah Aparat Satgas Penegakan Perda dan Pergub Sulawesi Selatan	120	0,00	78,00	78,00	100,00	100,00	178,00	148,33
1.01	05	01.00	02		PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI POLISI PAMONG PRAJA	Cakupan Petugas SatPol PP yang terlatih	100	20,00	100,00	73,33	73,33	100,00	193,33	193,33
1.01	05	01.00	02	001	Pengembangan Sumber Daya Aparatur Sat.Pol.PP	Jumlah peserta Aparat Sat.Pol.PP dalam peningkatan kualitas SDM	110	15,00	0,00	0,00	0,00	100,00	115,00	104,55
1.01	05	01.00	02	002	Pelatihan Dasar/ Kesamaptaan Sat.Pol.PP	Jumlah peserta pelatihan dasar/ kesamaptaan personil Pol.PP	65	80,00	65,00	65,00	100,00	65,00	210,00	323,08
1.01	05	01.00	02	003	Pembinaan Mental, Spritual dan Etika Pegawai Sat.Pol.PP	Jumlah peserta pembinaan Mental, Spritual dan Etika Pegawai Sat.Pol.PP	250	100,00	150,00	100,00	66,67	200,00	400,00	160,00
1.01	05	01.00	02	004	Penguatan kapasitas kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Rekrutmen Tenaga Teknis Operasional Sat.Pol.PP	100	70,00	100,00	0,00	0,00	100,00	170,00	170,00
1.01	05	01.00	02	005	Pembinaan Pelatihan Rescue Sat.Pol.PP	Jumlah anggota Sat.Pol.PP terlatih dalam penyelamatan	40	50,00	0,00	0,00	0,00	35,00	85,00	212,50
1.01	05	01.00	02	006	Bimbingan dan Penyuluhan Keamanan, Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah peserta masyarakat yang diberikan bimbingan dan penyuluhan	50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	80,00
1.01	05	01.00	02	007	Pembinaan, Penyuluhan dan Pemahaman tentang Perda, Pergub dan Hukum Daerah	Jumlah peserta Aparat Sat.Pol.PP yang mengikuti penyuluhan dan pemahaman Perda, Pergub dan Hukum Daerah	75	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	86,67
1.01	05	01.00	02	008	Pembinaan, Penyuluhan dan edukasi potensi masyarakat melalui deteksi dini Penanganan gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah peserta Bimtek Aparat Sat.Pol.PP dalam penanganan deteksi dini	50	0,00	50,00	50,00	100,00	50,00	100,00	200,00
1.01	05	01.00	02	009	Bimbingan Teknis Penanganan Gejala Sosial	Jumlah peserta Bimtek Aparat Sat.Pol.PP penanganan secara dini gejala sosial	60	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	83,33

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01	05	01.00	02	010	Focus Group Discussion (FGD) Kewaspadaan Dini	Jumlah peserta FGD kewaspadaan dini	65	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	76,92
1.01	05	01.00	02	011	Satgas Kewaspadaan Dini dan Peringatan	Jumlah Aparat Satgas Kewaspadaan dini dan peringatan dini dari Sat.Pol.PP	60	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	91,67
1.01	05	01.00	02	012	Forum Kewaspadaan Dini	Jumlah peserta Forum kewaspadaan dini	50	0,00	50,00	50,00	100,00	45,00	95,00	190,00
1.01	05	01.00	02	013	Pemetaan Wilayah Kewaspadaan Dini	Jumlah lokasi yang telah dipetakan rawan gangguan Trantibum dan Tranmas	15	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	66,67
1.01	05	01.00	03		PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran, Keamanan, Ketertiban dan Keamanan	100	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	220,00	220,00
1.01	05	01.00	03	001	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Aparat Sat.Pol.PP dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15	110,00	5,00	5,00	100,00	10,00	125,00	833,33
1.01	05	01.00	03	002	Penanganan Gangguan Trantibum	jumlah Pengamanan Gangguan Trantibum	120	60,00	0,00	0,00	0,00	100,00	160,00	133,33
1.01	05	01.00	03	003	Penyelenggaraan Patroli Wilayah	Jumlah Patroli Wilayah yang dilaksanakan	90	60,00	76,00	76,00	100,00	80,00	216,00	240,00
1.01	05	01.00	03	004	Penyelenggaraan Apel Besar Sat.Pol.PP	jumlah penyelenggaraan Apel besar secara terpusat di sulsel	3	1,00	2,00	2,00	100,00	2,00	5,00	166,67
1.01	05	01.00	03	005	Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Pengamanan dan Pengawasan aparat Sat.Pol.PP yang dilaksanakan	140	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	85,71
1.01	05	01.00	03	006	Pembinaan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Lembaga/ Instansi Terkait	Jumlah Pelaksanaan kerjasama dalam penyelenggaraan Trantibum yang terlaksana	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	100,00
1.01	05	01.00	03	007	Operasi Penerbitan gangguan ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Penerbitan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	100,00
1.01	05	01.00	03	008	Penyusunan Juknis dan SOP Pengendalian Operasi Penyelenggaraan Trantibum	Jumlah Juknis dan SOP pengendalian Operasi penyelenggaraan Trantibum	5	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	6,00	120,00
1.01	05	01.00	03	009	Satgas Pengendalian Operasi Penyelenggaraan Trantibum	Jumlah aparat satgas operasi pengendalian Trantibum	110	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	100,00

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01	05	01.00	03	010	Pemetaan Wilayah Operasi Penyelenggaraan Trantibum	Jumlah data lokasi operasi yang telah dipetakan penerbitan Gangguan Trantibum dan Tranmas	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	05	01.00	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	100	20,00	100,00	83,33	83,33	100,00	203,33	203,33
1.01	05	01.00	05	001	Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	jumlahPencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba	65	50,00	0,00	0,00	0,00	60,00	110,00	169,23
1.01	05	01.00	05	002	Bimtek Bela Negara	Jumlah peserta Bimtek Bela Negara	60	100,00	0,00	0,00	0,00	55,00	155,00	258,33
1.01	05	01.00	05	003	Penyuluhan dan Sosialisasi Linmas	Jumlah peserta Sosialisasi Linmas	60	105,00	54,00	54,00	100,00	55,00	214,00	356,67
1.01	05	01.00	05	004	Analisis Data Gangguan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah Analisis Data Gangguan Trantibum	4	4,00	0,00	0,00	0,00	3,00	7,00	175,00
1.01	05	01.00	05	005	Pembinaan dan Pemberdayaan Sat.Linmas	Jumlah Peserta Pembinaan Sat.Linmas	65	45,00	50,00	50,00	100,00	60,00	155,00	238,46
1.01	05	01.00	05	006	Penguatan perlindungan masyarakat dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Pelaksanaan penguatan Linmas dalam penanganan penyandang PMKS	11	0,00	2,00	1,00	50,00	8,00	9,00	81,82
1.01	05	01.00	05	007	Pengembangan Potensi masyarakat dan penanganan bencana dan pengungsi	Jumlah pelaksanaan pengembangan potensi masyarakat dalam menangani bencana dan pengungsi	20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	75,00
1.01	05	01.00	05	008	Penyusunan Profil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah audio/ visual Profil Dokumentasi kegiatan Sat.Pol.PP Provinsi Sulawesi Selatan	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00
1.01	05	01.00	05	009	Bimtek Sistem Informasi Manajemen/ Data dan Informasi Pelaporan Sat.Pol.PP	Jumlah Peserta Bimtek Sistem Informasi Manajemen/ Data dan Pelaporan Sat.Pol.PP yang Responsif Gender	70	50,00	0,00	0,00	0,00	65,00	115,00	164,29
1.01	05	01.00	05	010	Pengembangan Potensi Masyarakat dalam mewujudkan Keamanan, Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah pelaksanaan pembinaan pengembangan potensi masyarakat dalam mewujudkan Keamanan, Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	75,00
1.01	05	01.00	05	011	Gladi Penanggulangan dan Penanganan Pasca Bencana	Jumlah peserta gladi penanggulangan dan penanganan Pasca Bencana	125	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	92,00

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01	05	01.00	06		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA KEBAKARAN	Cakupan Pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota dan tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMMK)	100	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	220,00	220,00
1.01	05	01.00	06	001	Gladi Penanggulangan Kebakaran	Jumlah peserta gladi penanggulangan kebakaran	65	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	100,00	153,85
1.01	05	01.00	06	002	Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Aset Daerah	Jumlah peserta rapat koordinasi penanggulangan kebakaran aset daerah	60	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	83,33
1.01	05	01.00	06	003	Bimtek mentality dan kesamaptan bagi anggota Pemadam Kebakaran	Jumlah peserta Bimtek mentality dan kesamaptan bagi anggota Pemadam Kebakaran	65	50,00	40,00	40,00	100,00	60,00	150,00	230,77
1.01	05	01.00	06	004	Pemetaan Wilayah Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah lokasi yang telah dipetakan Rawan Bencana Kebakaran se Sulawesi Selatan	20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	75,00
1.01	05	01.00	06	005	Gladi Lapang Penyelamatan Bencana Kebakaran	Jumlah peserta gladi penyelamatan bencana kebakaran	65	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	120,00	184,62
1.01	05	01.00	06	006	Satgas Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran Aset Daerah	Jumlah aparat satgas penanggulangan dan penyelamatan kebakaran aset daerah	70	50,00	0,00	0,00	0,00	60,00	110,00	157,14
1.01	05	01.00	50		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	% Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100	20,00	100,00	95,42	95,42	100,00	215,42	215,42
1.01	05	01.00	50	001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, Internet, Dokumentasi/Publikasi, Koran/ Majalah, air dan listrik	12	1,00	12,00	12,00	100,00	12,00	25,00	208,33
1.01	05	01.00	50	002	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	9	0,00	8,00	8,00	100,00	8,00	16,00	177,78
						Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	30	0,00	30,00	19,00	63,33	30,00	49,00	163,33
1.01	05	01.00	50	003	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	jumlah Jasa Tenaga Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Jasa Kebersihan Kantor serta Jasa Sopir yang terbayarkan	12	121,00	12,00	12,00	100,00	12,00	145,00	1208,33

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01	05	01.00	50	004	Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Keamanan Kantor	12	0,00	12,00	12,00	100,00	12,00	24,00	200,00
1.01	05	01.00	50	005	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah ATK yang tersedia	120	100,00	100,00	100,00	100,00	110,00	310,00	258,33
1.01	05	01.00	50	006	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	30	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	100,00
1.01	05	01.00	50	008	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	65	0,00	45,00	45,00	100,00	55,00	100,00	153,85
1.02	06	01.01	50	009	Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran	Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
1.01	05	01.00	50	010	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	200	206,00	150,00	150,00	100,00	180,00	536,00	268,00
1.01	05	01.00	51		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	% Pemenuhan sarana prasarana perkantoran	100	20,00	100,00	96,86	96,86	100,00	216,86	216,86
1.01	05	01.00	51	002	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas	Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang dipelihara	100	2,00	0,00	0,00	0,00	100,00	102,00	102,00
1.01	05	01.00	51	004	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama	Jumlah Unit gedung kantor/asrama yang dipelihara	15	31,00	10,00	10,00	100,00	15,00	56,00	373,33
1.01	05	01.00	51	006	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas	Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara	115	35,00	85,00	77,00	90,59	100,00	212,00	184,35
1.01	05	01.00	51	009	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	12	120,00	12,00	12,00	100,00	12,00	144,00	1200,00
1.01	05	01.00	51	010	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	180	31,00	0,00	0,00	0,00	150,00	181,00	100,56
1.01	05	01.00	51	012	Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi/Website	Jumlah Berita/Informasi yang diposting di Website	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	05	01.00	52		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penggaran dan Pelaporan serta Evaluasi kinerja tepat waktu	100	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	220,00	220,00

1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.01	05	01.00	52	001	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Perangkat Daerah	60	50,00	0,00	0,00	0,00	60,00	110,00	183,33
1.01	05	01.00	52	002	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
						Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
						Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan	0	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
						Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan	24	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	100,00
1.01	05	01.00	52	004	Pengumpulan dan Publikasi Data dan Informasi OPD	Jumlah Laporan Data dan Informasi yang dikumpulkan	24	0,00	24,00	24,00	100,00	24,00	48,00	200,00
1.01	05	01.00	52	005	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	27	18,00	0,00	0,00	0,00	27,00	45,00	166,67
1.01	05	01.00	52	006	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
1.01	05	01.00	52	007	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00
1.01	05	01.00	53		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Cakupan Aparatur Yang Mendapatkan Pelatihan Kompetensi Dibidangnya % Kehadiran Pegawai	100	20,00	0,00	0,00	0,00	100,00	120,00	120,00
1.01	05	01.00	53	001	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	30	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	200,00
1.01	05	01.00	53	002	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya yang tersedia	130	492,00	0,00	0,00	0,00	130,00	622,00	478,46
1.01	05	01.00	53	003	Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu yang tersedia	250	492,00	0,00	0,00	0,00	250,00	742,00	296,80
1.01	05	01.00	53	008	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	40	121,00	0,00	0,00	0,00	30,00	151,00	377,50

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309) dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah aparat satpol.pp yang terlatih dan keahlian tertentu			300	375	550	625	300	375	550	625	
2	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas) kabupaten /kota			40270	40500	41500	42500	40270	40500	41500	42500	
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten /kota			35%	36%	37%	40%	35%	36%	37%	40%	
4	Tingkat penyelesaian pelanggaran k3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)			92%	93%	94%	95%	92%	93%	94%	95%	
5	Presentase penegakan perda dan perkada			89%	90%	94%	95%	89%	90%	94%	95%	
6	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (wmk)			75%	80%	82%	83%	75%	80%	82%	83%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Aspek strategis Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat 1 (satu) huruf e, disebutkan bahwa ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan dan menjadi tugas dari Kepala Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan adalah tangan dari Kepala Daerah untuk membantu dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat.

Suasana tentram dan tertib menjadi modal dasar baik dalam menjalankan roda pemerintahan dan roda perekonomian, kedua hal tersebut akan berjalan optimal apabila kondisi menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat tidak tercipta dengan baik oleh sebab itu, ketiga aspek pelayanan dasar tersebut menjadi aspek strategis bagi Satuan Polisi Pamong Praja sehingga pemerintah berkewajiban mendukung penguatan kelembagaan dan penganggaran guna menunjang pelaksanaan cipta kondisi tibatranmas serta perlindungan masyarakat yang kondusif dan berjalan secara optimal.

Isu strategis berkaitan dengan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2018-2023, juga melihat fakta permasalahan yang krusial dan tantangan pada tahun 2018-2023, maka dapat digambarkan perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yaitu :

1. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan yang bersertifikasi/memiliki keahlian khusus seperti intelijen, PPNS maupun pengadaan barang/jasa masih minim, tentu saja sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan OPD;
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang ketugasan;
3. Koordinasi didalam kerjasama antar instansi, kabupaten/kota, masyarakat, dan stake holders masih kurang;
4. Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah belum optimal seiring dengan perkembangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang semakin kompleks;
5. Wilayah perbatasan rawan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang masih belum mendapat perhatian khusus. Dukungan anggaran dan kerjasama dengan mitra kerja/ instansi terkait sangat diperlukan;

6. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dalam pasca penyelenggaraan Pilkada serentak di 12 Kabupaten/Kota;
7. Dampak dari pasca penanganan Extra Ordinary (Luar Biasa) akibat pandemi Covid-19 menjadi persoalan, tantangan dan ujian bersama;
8. Hari Ulang Tahun Satuan Polisi Pamong Praja secara Nasional yang direncanakan di Sulawesi Selatan yang telah di sampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

Pemasalahan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat berdampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Selatan terutama Misi Pertama 'Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif' dan Misi Keempat 'Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif' paradigma penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah yang sebelumnya responsif (tanggap darurat) menjadi preventif (kesiagaan), untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah.

Rekomendasi Strategis dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan

1. Aspek regulasi, perlu meningkatkan kompetensi serta kapasitas SDM dalam setiap organisasi, diperlukan sebuah kegiatan berupa Bimtek, Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) yang berjenjang agar mendapatkan pengetahuanyang mungkin belum didapatkan atau sebagai penyegaran kembali (refreshing);
2. Aspek kebutuhan personil yang merupakan sebuah pondasi yang sangat penting dalam aktivitas sebuah organisasi. Keberhasilan kinerja dalam aktivitas juga sangat ditentukan oleh SDM, berdasarkan kualitas (kapasitas, kompetensi) dan kuantitas SDM. Permasalahan SDM Satpol PP lebih banyak dititik beratkan pada kuantitasnya. Tidak ada rekrutmen baru untuk anggota PNS. Di luar hal tersebut, SDM Satpol PP harus menerima beban pekerjaan yang semakin besar dan cenderung bersifat tidak teratur/bersifat ad hoc
3. Aspek Sarana prasarana, untuk mendukung kegiatan operasi dibutuhkan sarana prasarana pendukung dengan mencoba mengusulkan kebutuhan sarana prasarana pendukung untuk kegiatan patroli sesuai dengan SPM, bahwa Satpol PP melaksanakan patroli 3 (tiga) kali dalam sehari.
4. Aspek pembiayaan, jelas bahwa untuk mendukung kegiatan operasi dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dibutuhkan anggaran yang memadai melalui usulan anggaran dalam program dan kegiatan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kedua dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tersebut, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan belum menjadi kebijakan utuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan karena masih menjadi bagian dalam kebijakan Kesbangpol. Atas dasar tersebut, perlu adanya komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Permendagri Nomor 69 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang tertuang dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan kebutuhan pendanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Satuan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 bahwa Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sudah masuk dalam sub kegiatan, Satuan Polisi Pamong Praja masih membutuhkan personil, sarana, prasarana dan anggaran yang memadai untuk membiaya program dan kegiatan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya pada awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mengacu kepada 9 (sembilan) Program dan 77 (tujuh puluh tujuh) Kegiatan, setelah pemetaan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berubah menjadi 2(dua) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 55 (lima puluh lima) Sub Kegiatan. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2021 dapat dilihat pada tabel T-C.31

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Kerja												Lembar dari	
No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Analisis		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% Keterpenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		% Keterpenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu					
01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun	0 Dokumen	-	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Sulawesi Selatan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ketentraman dan ketertiban umum yang tersusun	0 Dokumen	-			
		Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Renja yang tersusun	2 Dokumen	10.000.000,00		Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Renja yang tersusun	2 Dokumen	10.000.000,00			
02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	4 Dokumen	10.000.000,00	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	4 Dokumen	10.000.000,00			
03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun	24 Dokumen	20.000.000,00	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Sulawesi Selatan	Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun	24 Dokumen	20.000.000,00			
04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Sulawesi Selatan	Jumlah Koordinasi yang terlaksana	60 Orang	100.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Sulawesi Selatan	Jumlah Koordinasi yang terlaksana	60 Orang	100.000.000,00			
2	Administrasi Keuangan		% Pemenuhan administrasi Keuangan			Administrasi Keuangan		% Pemenuhan administrasi Keuangan					
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sulawesi Selatan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sulawesi Selatan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	149 Orang	21.841.997.772,00			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
02	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	27 Laporan	20.000.000,00	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Sulawesi Selatan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	27 Laporan	20.000.000,00	
03	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Sulawesi Selatan	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	2 Laporan	25.000.000,00	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Sulawesi Selatan	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	2 Laporan	25.000.000,00	
04	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Sulawesi Selatan	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	2 Laporan	8.156.879,87	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Sulawesi Selatan	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	2 Laporan	8.156.879,87	
3	Administrasi Umum		% Pemenuhan administrasi Umum			Administrasi Umum		% Pemenuhan administrasi Umum			
01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sulawesi Selatan	Jumlah biaya tagihan telepon, Internet, Dokumentasi/ Publikasi, Koran/ Majalah, air dan listrik	12 Bulan	126.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sulawesi Selatan	Jumlah biaya tagihan telepon, Internet, Dokumentasi/ Publikasi, Koran/ Majalah, air dan listrik	12 Bulan	126.000.000,00	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Sulawesi Selatan	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	9 Unit	100.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Sulawesi Selatan	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	13 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	30 Unit				Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	41 Unit		
03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sulawesi Selatan	Jumlah ATK yang tersedia	120 Jenis ATK	100.000.000,00	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sulawesi Selatan	Jumlah ATK yang tersedia	120 Jenis ATK	100.000.000,00	
04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sulawesi Selatan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	100 Jenis	50.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sulawesi Selatan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	100 Jenis	50.000.000,00	
05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Sulawesi Selatan	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	30 Unit	35.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Sulawesi Selatan	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	30 Unit	35.000.000,00	
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sulawesi Selatan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	12 Bulan	24.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sulawesi Selatan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	12 Bulan	24.000.000,00	
07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Sulawesi Selatan	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	65 Jenis	400.000.000,00	Penyediaan Makanan dan Minuman	Sulawesi Selatan	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	12 Bulan	400.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
08	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Sulawesi Selatan	Jumlah perjalanan dinas	200 Kali	400.000.000,00	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Sulawesi Selatan	Jumlah perjalanan dinas	200 Kali	400.000.000,00	
09	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Sulawesi Selatan	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	12 Unit	50.000.000,00	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Sulawesi Selatan	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	12 Bulan	50.000.000,00	
10	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Sulawesi Selatan	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	12 Bulan	50.000.000,00	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Sulawesi Selatan	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	12 Bulan	50.000.000,00	
11	Pengadaan Mebeleur	Sulawesi Selatan	Jumlah Mebeleur yang tersedia	12 Bulan	50.000.000,00	Pengadaan Mebeleur	Sulawesi Selatan	Jumlah Mebeleur yang tersedia	12 Bulan	50.000.000,00	
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Sulawesi Selatan	Jumlah Gedung Kantor/asrama yang dipelihara	15 Unit	100.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Sulawesi Selatan	Jumlah Gedung Kantor/asrama yang dipelihara	12 Bulan	100.000.000,00	
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Sulawesi Selatan	Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	115 Unit	50.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Sulawesi Selatan	Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	12 Bulan	50.000.000,00	
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Sulawesi Selatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	54 Unit	100.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Sulawesi Selatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	12 Bulan	100.000.000,00	
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Sulawesi Selatan	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	100 Unit	45.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Sulawesi Selatan	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	12 Bulan	45.000.000,00	
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Sulawesi Selatan	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	180 Unit	25.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Sulawesi Selatan	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	12 Bulan	25.000.000,00	
17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Sulawesi Selatan	Jumlah mebeleur yang dipelihara	12 Bulan	15.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Sulawesi Selatan	Jumlah mebeleur yang dipelihara	12 Bulan	15.000.000,00	
18	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Sulawesi Selatan	Jumlah Unit Rumah/Gedung Kantor yang di rehab	12 Bulan	100.000.000,00	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Sulawesi Selatan	Jumlah Unit Rumah/Gedung Kantor yang di rehab	12 Bulan	100.000.000,00	
4	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		% ASN berkinerja sangat baik			Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		% ASN berkinerja sangat baik			
01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Sulawesi Selatan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia	130 Pasang	100.000.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Sulawesi Selatan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia	145 Pasang	191.990.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
02	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Sulawesi Selatan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang tersedia	250 Pasang	200.000.000,00	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Sulawesi Selatan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang tersedia	265 Pasang	344.220.000,00	
03	Pengadaan Pakaian Korpri	Sulawesi Selatan	Jumlah Pakaian Korpri yang tersedia	130 Pasang	100.000.000,00	Pengadaan Pakaian Korpri	Sulawesi Selatan	Jumlah Pakaian Korpri yang tersedia	133 Pasang	103.345.000,00	
04	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Sulawesi Selatan	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	250 Pasang	200.000.000,00	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Sulawesi Selatan	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	259 Pasang	213.675.000,00	
05	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sulawesi Selatan	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	40 Orang	60.000.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sulawesi Selatan	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	200 Orang	60.000.000,00	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Warga yang memperoleh layanan Penegakan Hukum, Perda dan Perkada.			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Warga yang memperoleh layanan Penegakan Hukum, Perda dan Perkada.			
5	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Aparat SatPol PP Dalam Peningkatan Kualitas SDM			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Aparat SatPol PP Dalam Peningkatan Kualitas SDM			
01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sulawesi Selatan	Jumlah Tenaga Keamanan dari Istansi vertical	12 Bulan	200.000.000,00	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sulawesi Selatan	Jumlah Tenaga Keamanan dari Istansi vertical	23 Orang	345.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Pengamanan Non PNS	12 Bulan	9.979.000.000,00			Jumlah Tenaga Pengamanan Non PNS	400 Orang	14.880.000.000,00	
02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Sulawesi Selatan	Jumlah Monitoring deteksi dini	50 Kali	150.000.000,00	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Sulawesi Selatan	Jumlah Monitoring deteksi dini	50 Kali	150.000.000,00	
		Sulawesi Selatan	Jumlah Patroli Yang Terlaksana	80 Kali	130.000.000,00		Sulawesi Selatan	Jumlah Patroli Yang Terlaksana	80 Kali	130.000.000,00	
		Sulawesi Selatan	Jumlah Penertiban	15 Kali	40.000.000,00		Sulawesi Selatan	Jumlah Penertiban	7 Kali	40.000.000,00	
		Sulawesi Selatan	Jumlah Pengamanan Yang Terlaksana	120 Kali	250.000.000,00		Sulawesi Selatan	Jumlah Pengamanan Yang Terlaksana	80 Kali	250.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Tingkat Provinsi	Sulawesi Selatan	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Trantibum yang terlaksana	15 Kali	105.000.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Tingkat Provinsi	Sulawesi Selatan	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Trantibum yang terlaksana	2 Kali	105.000.000,00	
04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Sulawesi Selatan	Jumlah pembinaan yang terlaksana	125 Orang	280.000.000,00	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Sulawesi Selatan	Jumlah pembinaan yang terlaksana	4 Kali	280.000.000,00	
05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Sulawesi Selatan	Jumlah Aparat SatPol PP Dalam Peningkatan Kualitas SDM	110 Orang	150.000.000,00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Sulawesi Selatan	Jumlah Aparat SatPol PP Dalam Peningkatan Kualitas SDM	200 Orang	150.000.000,00	
06	Pembinaan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamongpraja	Sulawesi Selatan	Jumlah pembinaan Fungsional yang terlaksana	20 Kali	50.000.000,00	Pembinaan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamongpraja	Sulawesi Selatan	Jumlah pembinaan Fungsional yang terlaksana	2 Kali	50.000.000,00	
07	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Sulawesi Selatan	Jumlah pelaksanaan kerjasama antar lembaga yang terlaksana	5 Kali	18.000.000,00	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Sulawesi Selatan	Jumlah pelaksanaan kerjasama antar lembaga yang terlaksana	2 Kali	18.000.000,00	
6	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran PERDA			Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur		Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran PERDA			
01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Sulawesi Selatan	Jumlah Sosialisasi Perda dan Pergub yang terlaksana	75 Orang	25.000.000,00	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Sulawesi Selatan	Jumlah Sosialisasi Perda dan Pergub yang terlaksana	4 Kali	25.000.000,00	
02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Sulawesi Selatan	Jumlah Operasi Penertiban terhadap Praktek-praktek Ilegal	20 Kali	100.000.000,00	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Sulawesi Selatan	Jumlah Operasi Penertiban terhadap Praktek-praktek Ilegal	20 Kali	100.000.000,00	
		Sulawesi Selatan	Jumlah Pengawasan dan Penanganan Area Kawasan Tanpa Rokok	15 Kali	30.000.000,00		Sulawesi Selatan	Jumlah Pengawasan dan Penanganan Area Kawasan Tanpa Rokok	50 Kali	30.000.000,00	
03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Sulawesi Selatan	Jumlah Penyelesaian Kasus pelanggaran Perda dan Pergub	16 Kasus	115.000.000,00	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Sulawesi Selatan	Jumlah Penyelesaian Kasus pelanggaran Perda dan Pergub	20 Kali	115.000.000,00	
7	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		Jumlah Peserta Bimtek Pemberkasan Hasil Penyidikan			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi		Jumlah Peserta Bimtek Pemberkasan Hasil Penyidikan			
01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Sulawesi Selatan	Jumlah Pelaksanaan Bimtek PPNS	40 Orang	25.000.000,00	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Sulawesi Selatan	Jumlah Pelaksanaan Bimtek PPNS	2 Kali	25.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Cakupan Perlindungan Masyarakat			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Cakupan Perlindungan Masyarakat			
8	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		Jumlah Peserta Penanggulangan dan Penanganan Pasca Bencana			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		Jumlah Peserta Penanggulangan dan Penanganan Pasca Bencana			
01	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Provinsi	Sulawesi Selatan	Ketersediaan Dokumen Resiko dampak bencana Provinsi	1 Tahun	40.000.000,00	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Provinsi	Sulawesi Selatan	Ketersediaan Dokumen Resiko dampak bencana Provinsi	4 Dokumen	40.000.000,00	
02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Sulawesi Selatan	Jumlah Bimtek Sistem Informasi dan Pelaporan Rawan Bencana yang Terlaksana	70 Orang	30.000.000,00	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Sulawesi Selatan	Jumlah Bimtek Sistem Informasi dan Pelaporan Rawan Bencana yang Terlaksana	2 Kali	30.000.000,00	
03	Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana	Sulawesi Selatan	Ketersediaan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana pasca bencana dari hasil mitigasi	20 Kali	35.000.000,00	Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana	Sulawesi Selatan	Ketersediaan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana pasca bencana dari hasil mitigasi	1 Dokumen	35.000.000,00	
9	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Potensi Masyarakat Dalam Menangani Bencana dan Pengungsi			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Potensi Masyarakat Dalam Menangani Bencana dan Pengungsi			
01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Sulawesi Selatan	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Pasca Bencana dari hasil mitigasi	5 Dokumen	60.000.000,00	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Sulawesi Selatan	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Pasca Bencana dari hasil mitigasi	12 Bulan	60.000.000,00	
02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Sulawesi Selatan	Jumlah pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	20 Kali	50.000.000,00	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Sulawesi Selatan	Jumlah pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	5 Kali	50.000.000,00	
03	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Sulawesi Selatan	Jumlah komponen Masyarakat dalam pelatihan dan pemahaman untuk mencegah dalam penanggulangan bencana pada daerah rawan bencana	2 Kali	50.000.000,00	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Sulawesi Selatan	Jumlah komponen Masyarakat dalam pelatihan dan pemahaman untuk mencegah dalam penanggulangan bencana pada daerah rawan bencana	2 Kali	50.000.000,00	
04	Penanganan Pascabencana	Sulawesi Selatan	Jumlah penanganan pasca bencana	125 Orang	20.000.000,00	Penanganan Pascabencana	Sulawesi Selatan	Jumlah penanganan pasca bencana	15 Kali	20.000.000,00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
05	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Sulawesi Selatan	Jumlah komponen Masyarakat dalam tim Reaksi Cepat Bencana	60 Orang	30.000.000,00	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Sulawesi Selatan	Jumlah komponen Masyarakat dalam tim Reaksi Cepat Bencana	30 Orang	30.000.000,00	
10	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					
01	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		Jumlah penyelamatan dan evakuasi korban bencana	10 Kali	50.000.000,00	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana		Jumlah penyelamatan dan evakuasi korban bencana	10 Kali	50.000.000,00	
	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN		Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran			PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN		Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran			
11	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Aset Daerah			Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Aset Daerah			
01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran		Jumlah lokasi yang dipetakan rawan bencana kebakaran	20 Dokumen	135.000.000,00	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran		Jumlah lokasi yang dipetakan rawan bencana kebakaran	4 Lokasi	135.000.000,00	
02	Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran		Jumlah Dokumen rencana induk proteksi kebakaran	130 Orang	185.000.000,00	Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran		Jumlah Dokumen rencana induk proteksi kebakaran	2 Dokumen	185.000.000,00	
03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia		Jumlah pelatihan penanggulangan yang terlaksana	65 Orang	25.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia		Jumlah pelatihan penanggulangan yang terlaksana	14 Kali	25.000.000,00	
04	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Penanganan Kebakaran		Jumlah rapat koordinasi yang terlaksana	130 Orang	170.000.000,00	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Penanganan Kebakaran		Jumlah rapat koordinasi yang terlaksana	2 Kali	170.000.000,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan masyarakat sepenuhnya diusulkan dari bidang teknis dan Sekretariat dilingkungan Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan. Usulan-usulan program kegiatan tersebut selanjutnya dievaluasi berdasarkan isu-isu strategis yang terdapat dalam masyarakat dengan disinkronkan sesuai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan, diantaranya isu strategis mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak di 12 kabupaten/kota yang akan dilaksanakan pada tahun 2020

Selanjutnya seluruh usulan program dan kegiatan program tersebut dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyelaraskan dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang ada. Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel T-C.32 berikut :

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2021 belum melaksanakan Penelaahan Usulan Program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel T-C.32 berikut :

Tabel T-C.32.					
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021					
Provinsi Sulawesi Selatan					
Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021. serta merujuk pada prioritas pembangunan Nasional sebagaimana termuat dalam RKP Tahun 2021 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 untuk mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, yaitu : “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”

Untuk mencapai visi tersebut, implementasinya dijabarkan dalam 5 misi pembangunan yaitu :

1. Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif;
2. Peningkatan Infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel;
3. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
4. Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif;
5. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan masuk dalam misi Pertama ‘Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif’ dan misi Keempat ‘Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif’. Untuk mencapai misi pertama dan keempat serta tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan untuk Mewujudkan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional dan mewujudkan pemahaman dan kesadaran masyarakat provinsi Sulawesi Selatan terhadap pentingnya keikutsertaan dalam mematuhi Peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Perlindungan Masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang berkarakter kearifan lokal. Indikator tercapainya tujuan tersebut adalah dengan meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Dasar.

3.3. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun dalam Program Bina Administrasi Kewilayahan dengan sasaran program yaitu meningkatnya konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerjasama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan), dan batas antar Negara; serta meningkatnya standardisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta pencegahan dan penganggulangan bencana dan bahaya kebakaran. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu:

- a. Prosentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
- c. Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah;
- d. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat;
- e. Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal);
- f. Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Tujuan dan Sasaran merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018- 2023 yaitu :

1. Mewujudkan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Memadai;
2. Mewujudkan pemahaman dan kesadaran masyarakat provinsi Sulawesi Selatan terhadap pentingnya keikutsertaan dalam mematuhi Peraturan daerah, ketertiban umum danketentraman masyarakat, Perlindungan Masyarakat serta penanggulangan bencana berkarakter kearifan lokal.

Dan sasaran dalam pencapaian visi misi yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Terwujudnya kuantitas Sat.Pol.PP yang Profesional dan Memadai;
2. Terwujudnya persentase Cakupan Pelayanan Bencana kebakaran 7,5 Km.(Standar Nasional);
3. MeminimalisirTingkat Waktu tanggap (*respon time rate*) diatas 15 menit penanganan kebakaran dalam layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WМК) masing2 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan;
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat di Sulawesi Selatan;

5. Terwujudnya penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) di Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan;
6. Meningkatkan Kesadaran masyarakat dalam memenuhi Norma Hukum.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Selatan, pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. Sejalan dengan Misi Pertama 'Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif' dan Misi Keempat 'Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif.

Program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD dimana ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, maka program dan kegiatan yang dirancang Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan 2021 terdiri atas 2 (dua) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 55 (lima puluh lima) Sub Kegiatan dengan jumlah pagu indikatif sebesar Rp. 42.340.384.669,87,00. Rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel T-C.33.

Tabel T-C.33.
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
 Provinsi Sulawesi Selatan**

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja										lembar dari			
Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
0	00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
0	00	01	1.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Keterpenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu							
0	00	01	1.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ketentraman dan keterlibatan umum yang tersusun	Sulawesi Selatan	0 Dokumen	-	APBD		0 Dokumen	-
						Jumlah Dokumen Renja yang tersusun	Sulawesi Selatan	2 Dokumen	10.000.000,00	APBD		2 Dokumen	10.000.000,00
0	00	01	1.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun	Sulawesi Selatan	4 Dokumen	10.000.000,00	APBD		4 Dokumen	10.000.000,00
0	00	01	1.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun	Sulawesi Selatan	24 Dokumen	20.000.000,00	APBD		24 Dokumen	20.000.000,00
0	00	01	1.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Koordinasi yang terlaksana	Sulawesi Selatan	60 Orang	100.000.000,00	APBD		60 Orang	100.000.000,00
0	00	01	1.02		Administrasi Keuangan	% Pemenuhan administrasi Keuangan							
0	00	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Sulawesi Selatan	149 Orang	21.841.997.772,00	DAU		155 Orang	24.026.197.549,00
0	00	01	1.02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	Sulawesi Selatan	27 Laporan	20.000.000,00	APBD		27 Laporan	25.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
0 00 01 1.02 07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun	Sulawesi Selatan	2 Laporan	25.000.000,00	APBD		2 Laporan	25.000.000,00
0 00 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	Sulawesi Selatan	2 Laporan	7.156.897,87	APBD		2 Laporan	8.000.674,35
0 00 01 1.03	Administrasi Umum	% Pemenuhan administrasi Umum							
0 00 01 1.03 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, Internet, Dokumentasi/Publikasi, Koran/ Majalah, air dan listrik	Sulawesi Selatan	12 Bulan	126.000.000,00	APBD		12 Bulan	176.000.000,00
0 00 01 1.03 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan	Sulawesi Selatan	13 Unit	100.000.000,00	APBD		15 Unit	150.000.000,00
		Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 2 yang terbayarkan	Sulawesi Selatan	41 Unit		APBD		43 Unit	
0 00 01 1.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Sulawesi Selatan	120 Jenis ATK	100.000.000,00	APBD		150 Jenis ATK	150.000.000,00
0 00 01 1.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Sulawesi Selatan	100 Jenis	50.000.000,00	APBD		100 Jenis	50.000.000,00
0 00 01 1.03 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	Sulawesi Selatan	30 Unit	35.000.000,00	APBD		35 Unit	40.000.000,00
0 00 01 1.03 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	Sulawesi Selatan	12 Bulan	24.000.000,00	APBD		12 Bulan	24.000.000,00
0 00 01 1.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	Sulawesi Selatan	12 Bulan	400.000.000,00	APBD		12 Bulan	500.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
0 00 01 1.03 18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Sulawesi Selatan	200 Kali	400.000.000,00	APBD		220 Kali	500.000.000,00
0 00 01 1.03 23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tersedia	Sulawesi Selatan	12 Bulan	50.000.000,00	APBD		12 Bulan	50.000.000,00
0 00 01 1.03 25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Sulawesi Selatan	12 Bulan	50.000.000,00	APBD		12 Bulan	50.000.000,00
0 00 01 1.03 26	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang tersedia	Sulawesi Selatan	12 Bulan	50.000.000,00	APBD		12 Bulan	50.000.000,00
0 00 01 1.03 29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor/asrama yang dipelihara	Sulawesi Selatan	12 Bulan	100.000.000,00	APBD		12 Bulan	150.000.000,00
0 00 01 1.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara	Sulawesi Selatan	12 Bulan	50.000.000,00	APBD		12 Bulan	80.000.000,00
0 00 01 1.03 31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Sulawesi Selatan	12 Bulan	100.000.000,00	APBD		12 Bulan	100.000.000,00
0 00 01 1.03 33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Sulawesi Selatan	12 Bulan	45.000.000,00	APBD		12 Bulan	55.000.000,00
0 00 01 1.03 35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Sulawesi Selatan	12 Bulan	25.000.000,00	APBD		12 Bulan	35.000.000,00
0 00 01 1.03 36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	Sulawesi Selatan	12 Bulan	15.000.000,00	APBD		12 Bulan	20.000.000,00
0 00 01 1.03 39	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Unit Rumah/Gedung Kantor yang di rehab	Sulawesi Selatan	12 Bulan	100.000.000,00	APBD		12 Bulan	100.000.000,00
0 00 01 1.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% ASN berkinerja sangat baik							
0 00 01 1.04 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang tersedia	Sulawesi Selatan	145 Pasang	191.990.000,00	APBD		145 Pasang	191.990.000,00

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022						
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
0	00	01	1.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang tersedia	Sulawesi Selatan	265 Pasang	344.220.000,00	APBD		265 Pasang	344.220.000,00	
0	00	01	1.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah Pakaian Korpri yang tersedia	Sulawesi Selatan	133 Pasang	103.345.000,00	APBD		133 Pasang	103.345.000,00	
0	00	01	1.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	Sulawesi Selatan	259 Pasang	213.675.000,00	APBD		259 Pasang	213.675.000,00	
0	00	01	1.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Sulawesi Selatan	200 Orang	60.000.000,00	APBD		200 Orang	60.000.000,00	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga yang memperoleh layanan Penegakan Hukum, Perda dan Perkada.								
1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Aparat SatPol PP Dalam Peningkatan Kualitas SDM								
1	05	02	1.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Tenaga Keamanan dari Istansi vertical	Sulawesi Selatan	23 Orang	345.000.000,00	APBD		23 Orang	345.000.000,00	
						Jumlah Tenaga Pengamanan Non PNS	Sulawesi Selatan	400 Orang	14.880.000.000,00	APBD		400 Orang	14.880.000.000,00	
1	05	02	1.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Jumlah Monitoring deteksi dini	Sulawesi Selatan	50 Kali	150.000.000,00	APBD		50 Kali	150.000.000,00	
						Jumlah Patroli Yang Terlaksana	Sulawesi Selatan	80 Kali	130.000.000,00	APBD		80 Kali	130.000.000,00	
						Jumlah Penerbitan	Sulawesi Selatan	7 Kali	40.000.000,00	APBD		7 Kali	40.000.000,00	
						Jumlah Pengamanan Yang Terlaksana	Sulawesi Selatan	80 Kali	250.000.000,00	APBD		80 Kali	300.000.000,00	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	05	02	1.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Tingkat Provinsi	Jumlah koordinasi Penyelenggaraan Trantibum yang terlaksana	Sulawesi Selatan	2 Kali	105.000.000,00	APBD		2 Kali	105.000.000,00
1	05	02	1.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah pembinaan yang terlaksana	Sulawesi Selatan	4 Kali	280.000.000,00	APBD		6 Kali	380.000.000,00
1	05	02	1.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparat SatPol PP Dalam Peningkatan Kualitas SDM	Sulawesi Selatan	200 Orang	150.000.000,00	APBD		250 Orang	200.000.000,00
1	05	02	1.01	06	Pembinaan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah pembinaan Fungsional yang terlaksana	Sulawesi Selatan	2 Kali	50.000.000,00	APBD		2 Kali	50.000.000,00
1	05	02	1.01	07	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah pelaksanaan kerjasama antar lembaga yang terlaksana	Sulawesi Selatan	2 Kali	18.000.000,00	APBD		2 Kali	20.000.000,00
1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran PERDA							
1	05	02	1.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Sosialisasi Perda dan Pergub yang terlaksana	Sulawesi Selatan	4 Kali	25.000.000,00	APBD		5 Kali	35.000.000,00
1	05	02	1.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Operasi Penertiban terhadap Praktek-praktek Illegal	Sulawesi Selatan	20 Kali	100.000.000,00	APBD		20 Kali	100.000.000,00
						Jumlah Pengawasan dan Penanganan Area Kawasan Tanpa Rokok	Sulawesi Selatan	50 Kali	30.000.000,00	APBD		50 Kali	30.000.000,00
1	05	02	1.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penyelesaian Kasus pelanggaran Perda dan Pergub	Sulawesi Selatan	20 Kali	115.000.000,00	APBD		20 Kali	115.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 05 02 1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Peserta Bimtek Pemberkasan Hasil Penyidikan							
1 05 02 1.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Pelaksanaan Bimtek PPNS	Sulawesi Selatan	2 Kali	25.000.000,00	APBD	2 Kali	30.000.000,00	
1 05 03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Perlindungan Masyarakat							
1 05 03 1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Peserta Penanggulangan dan Penanganan Pasca Bencana							
1 05 03 1.01 01	Penyusunan Kajian Resiko Bencana Provinsi	Ketersediaan Dokumen Resiko dampak bencana Provinsi	Sulawesi Selatan	4 Dokumen	40.000.000,00	APBD	4 Dokumen	40.000.000,00	
1 05 03 1.01 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Bimtek Sistem Informasi dan Pelaporan Rawan Bencana yang Terlaksana	Sulawesi Selatan	2 Kali	30.000.000,00	APBD	2 Kali	35.000.000,00	
1 05 03 1.01 03	Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana	Ketersediaan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana pasca bencana dari hasil mitigasi	Sulawesi Selatan	1 Dokumen	35.000.000,00	APBD	1 Dokumen	40.000.000,00	
1 05 03 1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Potensi Masyarakat Dalam Menangani Bencana dan Pengungsi							
1 05 03 1.02 01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Pasca Bencana dari hasil mitigasi	Sulawesi Selatan	12 Bulan	60.000.000,00	APBD	12 Bulan	65.000.000,00	
1 05 03 1.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Sulawesi Selatan	5 Kali	50.000.000,00	APBD	5 Kali	50.000.000,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1 05 03 1.02 06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah komponen Masyarakat dalam pelatihan dan pemahaman untuk mencegah dalam penanggulangan bencana pada daerah rawan bencana	Sulawesi Selatan	2 Kali	50.000.000,00	APBD		2 Kali	50.000.000,00
1 05 03 1.02 07	Penanganan Pascabencana	Jumlah penanganan pasca bencana	Sulawesi Selatan	15 Kali	20.000.000,00	APBD		15 Kali	30.000.000,00
1 05 03 1.02 08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah komponen Masyarakat dalam tim Reaksi Cepat Bencana	Sulawesi Selatan	30 Orang	30.000.000,00	APBD		30 Orang	35.000.000,00
1 05 03 1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								
1 05 03 1.03 03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Sulawesi Selatan	10 Kali	50.000.000,00	APBD		10 Kali	50.000.000,00
1 05 04	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN								
1 05 04 1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran								
1 05 04 1.01 01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah lokasi yang dipetakan rawan bencana kebakaran	Sulawesi Selatan	4 Lokasi	135.000.000,00	APBD		4 Lokasi	140.000.000,00
1 05 04 1.01 02	Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen rencana induk proteksi kebakaran	Sulawesi Selatan	2 Dokumen	185.000.000,00	APBD		32 Dokumen	202.000.000,00
1 05 04 1.01 03	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Jumlah pelatihan penanggulangan yang terlaksana	Sulawesi Selatan	14 Kali	25.000.000,00	APBD		15 Kali	30.000.000,00
1 05 04 1.01 04	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Teknik Penanganan Kebakaran	Jumlah rapat koordinasi yang terlaksana	Sulawesi Selatan	2 Kali	170.000.000,00	APBD		2 Kali	189.000.000,00

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja ini juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020, sehingga Visi dan Misi Sulawesi Selatan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2021.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut sebagai upaya dalam mendukung capaian indikator kinerja maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban untuk melaksanakan program program kegiatan dalam Rencana Kerja 2021 dengan efektif dan efisien;
2. Rencana Kerja Tahun 2021 sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2021 dimana Rencana Kerja di jabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integritas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja seluruh aparatur secara berjenjang wajib melaksanakan pengawasan dan pengendalian;
4. Rencana Kerja Tahun 2021 mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Rencana Kerja Tahun 2021 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan penerapan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 disusun dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021.

Makassar, Juli 2020


 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 PROVINSI SULAWESI SELATAN,
Drs. MUJONO
 Pangkat Pembina Utama Muda
 NIP. 19640404 198303 1 007

TABEL KERJA
PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

PERMENDAGRI NO. 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA					PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019														
KODE		URUSAN	PROGRAM	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEG	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	BIDANG URUSAN	URUSAN	KODE					
				AMBIL DARI RENSTRA	AMBIL DARI RENSTRA	PMDN 90/2019	AMBIL DARI RENSTRA	PMDN 90/2019	AMBIL DARI RENSTRA	PMDN 90/2019		PMDN 90/2019							
1.01	05	01	001	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Program Layanan dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan	Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran PERDA	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran PERDA	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran PERDA	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga yang memperoleh layanan Penegakan Hukum, Perda dan Perkada.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	05	02	1.02	03
1.01	05	01	002	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Program Layanan dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Praktek Ilegal	Jumlah Operasi Penertiban terhadap prakte-praktek ilegal	Pengawasan dan kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Operasi Penertiban terhadap prakte-praktek ilegal	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Operasi Penertiban terhadap prakte-praktek ilegal	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga yang memperoleh layanan Penegakan Hukum, Perda dan Perkada.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	05	02	1.02	02
1.01	05	01	003	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Program Layanan dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Jumlah Peserta Bimtek Pemberkasan Hasil Penyidikan	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Peserta Bimtek Pemberkasan Hasil Penyidikan	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Peserta Bimtek Pemberkasan Hasil Penyidikan	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga yang memperoleh layanan Penegakan Hukum, Perda dan Perkada.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	05	02	1.03	01
1.01	05	01	004	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Program Layanan dan Penegakan Produk Hukum Daerah	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Tanpa Rokok	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Area Kawasan Tanpa Rokok	Pengawasan atas kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Area Kawasan Tanpa Rokok	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Area Kawasan Tanpa Rokok	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga yang memperoleh layanan Penegakan Hukum, Perda dan Perkada.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	05	02	1.02	02
1.01	05	02	001	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Program Peningkatan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja	Pengembangan Sumber Daya Aparatur SatPol PP	Jumlah Aparat SatPol PP Dalam Peningkatan Kualitas SDM	Peningkatan Kapasitas SDM SatPol PP dan Sat. Linmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM	Jumlah Aparat SatPol PP Dalam Peningkatan Kualitas SDM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kab/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Aparat SatPol PP Dalam Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Petugas SatPol PP yang terlatih	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	05	02	1.01	05
1.01	05	02	001	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Program Peningkatan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja	Pengembangan Sumber Daya Aparatur SatPol PP	Jumlah Aparat SatPol PP Dalam Peningkatan Kualitas SDM	Peningkatan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparat SatPol PP Dalam Peningkatan Kualitas SDM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kab/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Aparat SatPol PP Dalam Peningkatan Kualitas SDM	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Petugas SatPol PP yang terlatih	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	05	02	1.01	06
1.01	05	02	007	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Program Peningkatan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja	Pembinaan, Penyuluhan dan Pemahaman tentang Perda, Pergub dan Hukum Daerah	Jumlah Peserta Aparat SatPol PP yang mengikuti penyuluhan dan pemahaman Perda	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Peserta Aparat SatPol PP yang mengikuti penyuluhan dan pemahaman Perda	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Peserta Aparat SatPol PP yang mengikuti penyuluhan dan pemahaman Perda	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Petugas SatPol PP yang terlatih	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	05	02	1.02	01
1.01	05	03	001	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Aparat SatPol PP Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi	Jumlah Koordinasi Aparat SatPol PP Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kab/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koordinasi Aparat SatPol PP Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	05	02	1.01	03
1.01	05	03	002	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Pengamanan Gangguan Trantibum	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengamanan Gangguan Trantibum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kab/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengamanan Gangguan Trantibum	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	05	02	1.01	01

1.01	05	03	003	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Program Peningkatan Kemaanan dan Kenyamanan Lingkungan	Penyelenggaraan Patroli Wilayah	Jumlah Patroli Wilayah yang terlaksana	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Patroli Wilayah yang terlaksana	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kab/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Patroli Wilayah yang terlaksana	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	05	02	1.01	01
1.01	05	03	006	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Program Peningkatan Kemaanan dan Kenyamanan Lingkungan	Pembinaan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Lembaga/Instansi Terkait	Jumlah Pelaksanaan Kerjasama dalam Penyelenggaraan Trantibum yang terlaksana	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknis pencegahan kejahatan	Jumlah Pelaksanaan Kerjasama dalam Penyelenggaraan Trantibum yang terlaksana	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kab/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Kerjasama dalam Penyelenggaraan Trantibum yang terlaksana	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	05	02	1.01	07
1.01	05	03	007	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Program Peningkatan Kemaanan dan Kenyamanan Lingkungan	Operasi Penertiban Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Penertiban Gangguan Ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan PERDA dan PERKADA	Jumlah Penertiban Gangguan Ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kab/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penertiban Gangguan Ketenteraman dan ketertiban masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	05	02	1.01	02
1.01	05	05	005	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Pembinaan dan Pemberdayaan Sat.Linmas	Jumlah Peserta Pembinaan Sat.Linmas	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Peserta Pembinaan Sat.Linmas	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kab/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Peserta Pembinaan Sat.Linmas	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Perlindungan Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	05	02	1.01	04
1.01	05	05	003	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Penyuluhan dan Sosialisasi Linmas	Jumlah Peserta Sosialisasi Linmas	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Peserta Sosialisasi Linmas	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Peserta Sosialisasi Linmas	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Perlindungan Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	05	02	1.02	01
1.01	05	05	007	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Pengembangan Potensi Masyarakat dan Penanganan Bencana dan Pengungsi	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Potensi Masyarakat Dalam Menangani Bencana dan Pengungsi	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Potensi Masyarakat Dalam Menangani Bencana dan Pengungsi	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Potensi Masyarakat Dalam Menangani Bencana dan Pengungsi	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Cakupan Perlindungan Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	05	03	1.02	03
1.01	05	05	009	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Bimtek Sistem Manajemen/Data dan Informasi Pelaporan SatPol PP	Jumlah Peserta Bimtek Sistem Informasi Manajemen Data dan Pelaporan SatPol PP	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Peserta Bimtek Sistem Informasi Manajemen Data dan Pelaporan SatPol PP	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Peserta Bimtek Sistem Informasi Manajemen Data dan Pelaporan SatPol PP	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Cakupan Perlindungan Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	05	03	1.01	02
1.01	05	05	011	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Gladi Penanggulangan dan Penanganan Bencana Pasca Bencana	Jumlah Peserta Penanggulangan dan Penanganan Pasca Bencana	Penanganan Pasca Bencana	Jumlah Peserta Penanggulangan dan Penanganan Pasca Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peserta Penanggulangan dan Penanganan Pasca Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Cakupan Perlindungan Masyarakat	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	05	03	1.02	07
1.01	05	06	002	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Program Peningkatan Pelayanan dan Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran	Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Aset Daerah	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Aset Daerah	Kerjasama antar lembaga kemitraan dalam teknik penanganan kebakaran	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Aset Daerah	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Aset Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	05	04	1.01	05
1.01	05	06	004	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Program Peningkatan Pelayanan dan Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran	Pemetaan Wilayah Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Lokasi Yang Dipetakan Rawan Bencana Kebakaran Sulawesi Selatan	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Lokasi Yang Dipetakan Rawan Bencana Kebakaran Sulawesi Selatan	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Lokasi Yang Dipetakan Rawan Bencana Kebakaran Sulawesi Selatan	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	05	04	1.01	01

1.01	05	06	005	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Program Peningkatan Pelayanan dan Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran	Gladi Lapang Penyelamatan Bencana Kebakaran	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Aset Daerah	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Damkar)	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Aset Daerah	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Aset Daerah	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	05	04	1.01	04
USULAN PEMUTAKHIRAN USULAN (SUB KEGIATAN)																			
			1	SATGAS KEWASPADAAN DINI DAN PERINGATAN															
			2	PENGUATAN KAPASITAS KELENGAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA															
			3	PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOBA															
			4	SATGAS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN															
			5	PENYELENGGARAAN APEL BESAR SATPOL PP															
			6	PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN KASUS PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA															
			7	BIMTEK BELA NEGARA															

Makassar 2020

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

 DR. MUJIBNO
 NIP. 196401041983031007